BAB II

TINJAUAN TEORI DAN DATA

II. 1. Studi Literatur

II. 1. 1. Tinjauan Umum Museum

A. Definisi Museum

Menurut Ensiklopedia Indonesia yang di terbitkan oleh Ichtisar Baru – Van Houve, 1984. Menjelaskan pengertian Museum sebagai berikut :

“Museum adalah bangunan tempat orang, memelihara, menelaah, dan memamerkan barang-barang yang mempunyai nilai lestari, misalnya peninggalan sejarah, seni, ilmu dan barang-barang kuno.”

Sedangkan pengertian yang telah dirumuskan oleh ICOM (*International Council of Museums*, 1974), bahwa Museum adalah:

“Sebuah lembaga yang bersifat tetap dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan perkembangannya, tidak mencuri keuntungan, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan untuk tujuan–tujuan studi, pendidikan, kesenangan, benda-benda pembuktian manusia dan lingkungannya.”

Selain pengertian diatas, Kata Museum Secara *etimologis* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Berdasarkan kamus Oxford, kata museum berasal dari kata "*Mouse*" yang mempunyai arti ruang atau merupakan suatu tempat untuk menyimpan barang-barang yang bersifat seni dan pengetahuan.

b. Sedangkan pengertian museum berdasarkan rumusan para cendekiawan bahwa museum berasal dari kata Yunani, *mouseion*, yang sebenarnya merujuk kepada nama kuil pemujaan terhadap *Muses*, dewa yang berhubungan dengan kegiatan seni.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa museum memiliki persamaan arti yaitu tempat untuk merawat, memelihara, dan memamerkan barang-barang peninggalan sejarah, seni, ilmu dan barang-barang kuno, bersifat tetap, terbuka untuk umum. Berguna untuk tujuan–tujuan studi, pendidikan, kesenangan, benda-benda pembuktian manusia dan lingkungannya.

Lebih dari itu, museum merupakan suatu tempat untuk menyelamatkan dan memelihara warisan budaya berikut sejarahnya, juga sebagai tempat segala kegiatanya meliputi mengumpulkan, merawat, meneliti, memamerkan, dan menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan mengenai benda-benda koleksi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Museum juga merupakan sebuah lembaga pelestari kebudayaan bangsa, baik yang berupa benda (*tangible*) seperti

artefak, fosil, dan benda-benda etnografi maupun tak benda (*intangible*) seperti nilai, tradisi, dan norma.

Museum menyediakan sumber informasi yang meliputi segala aspek kebudayaan dan lingkungan. Museum menyediakan berbagai macam sumber inspirasi bagi kreativitas yang inovatif yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Namun museum harus tetap memberikan nuansa *rekreatif* dan *edukatif* bagi pengunjungnya. Kurator perlu melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan koleksi serta menyusun tulisan yang bersifat ilmiah dan *populer*. Hasil penelitian dan tulisan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat, dalam kegiatan ini kurator bekerjasama dengan bagian publikasi. Sebagai lembaga pelestari budaya bangsa, museum harus berazaskan pelayanan terhadap masyarakat. Program-program museum yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum.

B. Jenis-jenis Museum Menurut Buku Pedoman Pendirian Museum (1999)

Jenis museum dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:

a. Koleksi museum.
b. Kedudukan museum.
c. Penyelenggaraan museum.
d. Kriteria museum.

a. Jenis museum menurut koleksinya

Menurut koleksinya jenis museum dapat dibagi beberapa jenis, tetapi secara garis besar dapat dibagi dalam 2 bagian besar yaitu:

1. Museum Umum

Museum yang Koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan seni, disiplin ilmu dan teknologi. Contoh Museum Umum adalah Museum Mpu Tantular.

2. Museum Khusus

Museum yang Koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan salah satu cabang disiplin ilmu dan teknologi. Contoh Museum Umum adalah Museum Kebangkitan Nasional, Museum Wayang dan Museum Bahari.

b. Jenis museum berdasarkan kedudukannya

Menurut kedudukannya, museum dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Museum Nasional

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional.

2. Museum Provinsi

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dari dalam provinsi tertentu atau satu provinsi.

3. Museum Lokal

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dalam satu wilayah kabupaten atau kotamadya.

c. Museum berdasarkan penyelenggaraannya

Menurut penyelenggaraannya, museum dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Museum Pemerintah

Museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah setempat.

2. Museum Swasta

Museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta.

d. Museum berdasarkan kriteria

Menurut kriterianya, museum dapat dibagi menjadi 7 yaitu:

1. Museum Seni

Museum yang memberikan sebuah ruang untuk pameran seni, biasanya merupakan seni *visual*, dan biasanya terdiri dari lukisan, ilustrasi, dan patung. Koleksi dari lukisan dan dokumen lama

biasanya tidak dipamerkan di dinding, akan tetapi diletakkan di ruang khusus.

2. Museum Sejarah

Museum yang memberikan *edukasi* terhadap sejarah dan relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. Beberapa museum sejarah menyimpan aspek kuratorial tertentu dari sejarah dari daerah lokal tertentu. Museum jenis ini memiliki koleksi yang beragam termasuk dokumen, artefak.

3. Museum *Maritim*

Museum yang menspesialisasi terhadap objek yang berhubungan dengan kapal, perjalanan di laut dan danau.

4. Museum *Otomotif*

Museum yang memamerkan kendaraan.

5. Museum *Open Air*

Museum yang mengkoleksi dan membangun kembali bangunan tua di daerah terbuka luar. Biasanya bertujuan untuk menciptakan kembali bangunan dan suasana lansekap masa lalu.

6. Science Museum

Museum yang membahas tentang seputar masalah *scientific*, dan sejarahnya. Untuk menjelaskan penemuan-penemuan yang kompleks, pada umumnya digunakan media visual.

7. Museum *Spesialisasi*

Museum yang mengkhususkan pada topik tertentu. Contoh museum ini adalah museum musik, museum anak, museum gelas,

dsb. Museum ini pada umumnya memberi *edukasi* dan pengalaman yang berbeda dibandingkan museum lainnya.

8. Museum *Virtual*

Museum yang berada di dunia maya berupa internet dimana tidak memiliki fisik museum dan isinya hanya berupa data.

C. Fungsi dan Kegiatan Museum

a. Fungsi Museum

Fungsi museum menurut ICOM (*International Council of Museum)* adalah sebagai wadah untuk:

⇒ Pengumpulan dan pengamanan warisan alam budaya

⇒ Dokumentasi dan penelitian ilmiah.

⇒ *Konservasi* dan *preservasi.*

⇒ Penyebaran dan penataan ilmu untuk umum.

⇒ Pengenalan kebudayaan antar daerah dan bangsa.

⇒ *Visualisasi* warisan alam budaya.

⇒ Cermin pertumbuhan peradaban manusia.

⇒ Pengenalan dan penghayatan kesenian.

b. Kegiatan Museum

Kegiatan museum secara rinci dijelaskan oleh Drs. Moch. Amir Sutaarga sebagai berikut: (Sutaarga, 1989).

- Pengumpulan atau pengadaan.

Tidak semua benda padat dimasukkan ke dalam koleksi museum, hanyalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:

⇒ Harus mempunyai nilai budaya, ilmiah dan nilai estetika.

⇒ Harus dapat diidentifikasi mengenai wujud, asal, tipe, gaya, dan sebagainya.

⇒ Harus dapat dianggap sebagai dokumen.

⇒ Pemeliharaan

Tugas pemeliharaan ada 2 aspek, yakni:

⇒ Aspek Teknis

Benda-benda materi koleksi harus dipelihara dan diawetkan serta dipertahankan tetap awet dan tercegah dari kemungkinan kerusakan.

⇒ Aspek Administrasi

Benda-benda materi koleksi harus mempunyai keterangan tertulis yang menjadikan benda-benda koleksi tersebut bersifat monumental.

⇒ Konservasi

Merupakan usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pencegahan dan penjagaan benda-benda koleksi dari penyebab kerusakan.

⇒ Penelitian

Bentuk penelitian ada 2 macam:

⇒ Penelitian *Intern*

Penelitian yang dilakukan oleh curator untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan museum yang bersangkutan.

⇒ Penelitian *Ekstern*

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari luar, seperti mahasiswa, pelajar, umum dan lain-lain untuk kepentingan karya ilmiah, skripsi, karya tulis, dll.

⇒ Pendidikan

Kegiatan disini lebih ditekankan pada pengenalan benda-benda materi koleksi yang dipamerkan:

⇒ Pendidikan Formal

Berupa seminar-seminar, diskusi, ceramah, dan sebagainya.

⇒ Pendidikan Non Formal

Berupa kegiatan pameran, pemutaran film, *slide*, dan sebagainya.

⇒ Rekreasi

Sifat pameran mengandung arti untuk dinikmati dan dihayati, yang mana merupakan kegiatan rekreasi yang segar,

tidak diperlukan konsentrasi yang akan menimbulkan keletihan dan kebosanan.

D. Faktor-faktor Utama Dalam Perancangan Museum

Dalam perancangan museum harus diperhatikan beberapa faktor utama untuk memberikan kesan nyaman pada penggguna, yaitu :

- Mempunyai ruang kerja bagi para konservatornya, dibantu perpustakaan dan *staffnya*.
- Mempunyai tempat/ruang untuk pameran koleksi.
- Mempunyai laboratorium untuk merawat benda-benda koleksinya dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan rusaknya benda-benda koleksi.
- Mempunyai studio dengan perlengkapannya untuk pembuatan *audio visual*, studio untuk reproduksi barang koleksi.
- Mempunyai perpustakaan sebagai referensi.
- Mempunyai ruangan untuk kegiatan penerangan dan *edukasi.*
- Mempunyai sirkulasi yang nyaman.

E. Persyaratan Perancangan Museum

- Persyaratan Umum
  - Lokasi

    Lokasi yang strategis dan menunjang perancangan museum. Lokasi perancangan museum terletak dipusat kota

sehingga sirkulasi pengunjung sangat mudah, terutama jalur darat. Terletak di kawasan sekolah, perumahan dan perkantoran.

- Luas

Museum merupakan bangunan publik. Oleh karena itu, luasan museum diukur dari banyaknya penduduk lokal daerah tersebut. Walupun begitu, terdapat beberapa museum yang luas di daerah dengan penduduk yang sedikit, begitu juga sebaliknya. Pendistribusian luas areal museum baru harus sesuai dengan pembagian yang merata, dimana luas areal untuk kuratorial ditambah administrasi dan servis harus seluas areal pameran.

Tabel.1 Standar Luasan Museum Berdasarkan Jumlah Penduduk Lokal

Populasi	Total luas areal museum
10.000 jiwa	$650m^2$ - $1300m^2$
25.000 jiwa	$1115m^2$ - $2230m^2$
50.000 jiwa	$1800m^2$ – $3600m^2$
100.000 jiwa	$2700m^2$ – $5500m^2$
250.000 jiwa	$4830m^2$ – $9800m^2$
500.000 jiwa	$7600m^2$ – $15000m^2$
>1.000.000 jiwa	$12000m^2$ – $23500m^2$

(Sumber : Buku “*Museum Buildings*” oleh *Laurence Vail Coleman*)

- Fasilitas

Bangunan museum dapat berupa bangunan baru atau memanfaatkan gedung lama. Harus memenuhi prinsip-prinsip *konservasi*, agar koleksi museum tetap lestari. Bangunan museum minimal dapat dikelompok menjadi dua kelompok, yaitu bangunan pokok (pameran tetap, pameran *temporer, auditorium*, kantor, *laboratorium konservasi*, perpustakaan, bengkel *preparasi*, dan ruang penyimpanan koleksi) dan bangunan penunjang (pos keamanan, museum *shop*, tiket *box*, toilet, *lobby,* dan tempat parkir).

- Koleksi

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan rohnya sebuah museum, maka koleksi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Prinsip dan persyaratan sebuah benda menjadi koleksi, antara lain:

⇒ Memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk nilai *estetika*).

⇒ Dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal secara historis dan geografis, atau periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda alam).

⇒ Harus dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti kenyataan dan eksistensinya bagi penelitian ilmiah.

b. Pertimbangan skala *prioritas*, yaitu penilaian untuk benda-benda yang bersifat:

⇒ *Masterpiece*, merupakan benda yang terbaik mutunya.

⇒ Unik, merupakan benda-benda yang memiliki ciri khas tertentu bila dibandingkan dengan benda-benda yang sejenis.

⇒ Hampir punah, merupakan benda yang sulit ditemukan karena dalam jangka waktu yang sudah terlalu lama tidak dibuat lagi.

⇒ Langka, merupakan benda-benda yang sulit ditemukan karena tidak dibuat lagi atau karena jumlah hasil pembuatannya hanya sedikit.

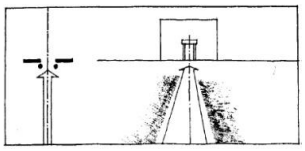
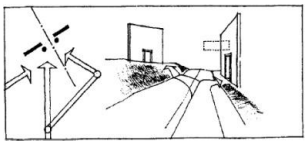
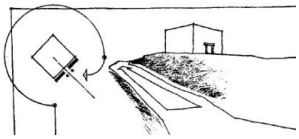
- Persyaratan Khusus
  - Prinsip Perancangan Ruang Museum
    - Sirkulasi

      Sirkulasi merupakan salah satu faktor yang menjadi penekanan dalam perancangan museum, sirkulasi mengantarkan gerak pengunjung untuk bisa menikmati koleksi dalam museum.

      Menurut Ching (2000), Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam sirkulasi dan interior ruang pamer yaitu pencapaian, hubungan jalur dan ruang, bentuk ruang sirkulasi. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

⇒ Pencapaian yaitu jalur yang ditempuh untuk mendekati/menuju bangunan. Pencapaian dibagi menjadi 3, dijelaskan dalam tabel berikut:

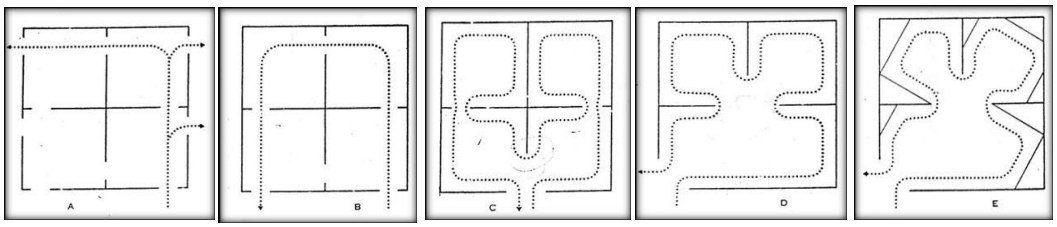
Tabel.2 Sirkulasi Pencapaian Bangunan

Pencapaian	Keterangan	Gambar
Langsung	suatu pendekatan yang mengarah langsung kesuatu tempat masuk, melalui sebuah jalan lurus yang segaris dengan alur sumbu bangunan.	
Tersamar	Pendekatan yang samar meningkatkan efek perspektif pada fasad depan dan bangunan	
Berputar	Jalur berputar memperpanjang urutan pencapaian	

(Sumber : Buku "*Architec Data*" oleh Ching)

⇒ Bentuk ruang sirkulasi lebih utama pada interor bangunan yang dapat menampung gerak pengunjung waktu berkeliling, berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati sesuatu yang dianggapnya menarik. Sirkulasi ini biasanya tercipta sesuai dengan bentuk *layout* bangunan. Pengarahan terhadap sirkulasi dapat dilakukan agar kegiatan pameran dapat berjalan lebih menarik.

Gambar.1 Sirkulasi Ruang dalam Museum



(Sumber : Buku *"Museum Buildings"* oleh *Laurence Vail Coleman*)

Menurut Laurence Vail Coleman dalam bukunya "*Museum Buildings"* terdapat Pengelompokan ruang dalam areal pameran. Terdapat beberapa susunan yang cukup familiar dalam pengelompokan ruang yakni :

⇒ Susunan ruang ke ruang

Merupakan susunan dengan ruang yang terletak pada kamar yang saling berhubungan secara menerus. Pada umumnya terdapat pada bangunan dengan ruang

pameran satu lantai dan bersebalahan dengan ruang *lobby*. Keuntungan dari susunan ini adalah pengelompokannya yang *simple* dan ruang yang cukup ekonomis. Kelemahan dari susunan ini adalah memungkinkannya terdapat satu ruangan yang tidak dilalui walaupun dikelilingi oleh ruang lainnya.

⇒ Susunan koridor ke ruang

Sering disebut sebagai susunan ruang dan *koridor* merupakan susunan dimana setiap ruang dapat diakses melalui sebuah *koridor*. Keuntungan dari susunan ini adalah setiap ruang dapat diakses secara langsung, oleh karena itu dapat ditutup tanpa memberikan pengaruh pada ruangan lainnya. Kelemahan dari susunan ini adalah hilangnya ruang sebagai ruang *koridor*, walaupun dapat diminimalisir dengan menjadikan ruang *koridor* sebagai ruang pameran juga.

⇒ Susunan lingkaran pusat

Merupakan susunan yang berpusat pada suatu ruangan dengan terdapat ruang-ruang kecil disekelilingnya. Keuntungan dari susunan ini adalah susunanya yang paling *fleksible* . Kekurangan dari susunan ini adalah ruang kecil yang berada di sekeliling ruang utama menjadi tidak terlalu sering dikunjungi ataupun terlalu *exclusive.*

Hubungan jalur dan ruang dapat difungsikan sebagai fleksibilitas ruang-ruang yang kurang strategis. Perencanaan sebuah jalur sirkulasi yang nyaman bagi pengunjung dalam menikmati koleksi yang dipamerkan dalam ruang museum koleksi sangat perlu sekali kaitanya dilakukan agar memberikan kenyamanan secara menyeluruh juga akan memberikan kesan menarik dan komunikatif.

- Koleksi Museum

Faktor koleksi yang ditampilkan merupakan salah satu syarat utama dalam perancangan museum, terutama dari segi visual merupakan sarana/mediator dari pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pengunjung yang datang. Berdasarkan hasil pengkajian koleksi, bahwa koleksi museum tidak hanya terbatas pada benda budaya tetapi juga benda-benda alam.

Mengingat sifat koleksi museum yang sangat kompleks, maka diperlukan suatu penanganan/pengelolaan melalui klasifikasi koleksi berdasarkan disiplin ilmu yang bersifat *konvensi*. Hasil klasifikasi koleksi tersebut untuk museum terdiri atas 10 (sepuluh) jenis koleksi yaitu :

1. *Geologika/Geografika*
2. *Biologika*
3. *Etnografika*

4. *Arkeologika*
5. *Historika*
6. *Numismatika* / *Heraldika*
7. *Filologika*
8. *Keramologika*
9. Seni Rupa / Seni Kria
10. Teknologika/*Modern*

II. 1. 2. Tinjauan Umum Maritim

A. Definisi Maritim

Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime,* yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah *maritime power* yaitu negara maritim atau negara samudera. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut juga pelayaran niaga, sehingga dapat di simpulkan bahwa maritim adalah berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut.

Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkup nya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada termonologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.

B. Perkembangan Kemaritiman Indonesia

Para ahli sejarah bangsa Eropa pernah melontarkan pernyataan bahwa sebetulnya nenek moyang bangsa Indonesia adalah mereka yang datang dari Asia Tenggara (Indochina/Yunan) dalam dua gelombang migrasi besar-besaran, yaitu pada 5000 tahun SM dan pada 2000 tahun SM melalui laut dan dalam mengarungi perjalanan tersebut sumber penghidupan mereka sangat tergantung

dari laut. Fakta prasejarah Cadas Gua yang terdapat di pulau-pulau Muna, Seram dan Arguni yang diperkirakan berasal dari 1000 tahun SM dipenuhi dengan lukisan perahu-perahu layar. Juga ditemukan beberapa artefak suku Aborigin di Australia yang diperkirakan berasal dari 2500 tahun SM serupa yang ditemukan di pulau Jawa. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa jauh sebelum gelombang migrasi dari Indochina yang datang ke Indonesia, nenek moyang bangsa-bangsa nusantara sudah berhubungan dengan suku Aborigin di Australian lewat laut.

Peninggalan prasejarah bekas kerajaan Merina yang didirikan oleh perantau dari Nusantara ditemukan juga di Madagaskar, hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang penduduk Nusantara pada masa itu telah memiliki teknologi pembuatan perahu bercadik dan perahu layar yang mampu mengarungi samudera dengan medan yang sangat berat. Jejak prasejarah bercirikan istilah maritim juga ditemukan di wilayah rumpun bahasa Austronesia, di mana pengaruh istilah maritim bahasa Nusantara terasa sangat kuat di bandingkan dengan pengaruh rumpun bahasa lainnya. Bertolak dari bukti prasejarah nusantara itu memberikan indikasi bahwa nenek moyang bangsa Nusantara adalah asli pelaut dan pengembara, dan sejak ribuan tahun sebelum Masehi sudah mampu menghadapi gelombang besar melewati samudera Pasifik dan samudera Hindia. Kenyataan sejarah ini memperlihatkan bahwa bangsa nusantara

adalah pelaut-pelaut ulung yang jejak kebudayaannya masih dapat diikuti sampai sekarang.

Pada jaman Hindu-Budha mulai menyebar kebudayaannya di kepulauan Nusantara, kerajaan-kerajaan di nusantara pun melakukan kegiatan maritim aktif, baik intra insular ataupun ekstra insular, hingga ke India dan Cina. Kepulauan Nusantara waktu itu merupakan wilayah yang kaya dengan komoditas perdagangan, dan geoposisi wilayah nusantara merupakan posisi silang dimana terdapat jaringan komunikasi dan transportasi maritim (misalnya rute Cina -Taruma -India), ditandai dengan ditemukannya artefak Cina dan India di Situs Batu Jaya Karawang. Salah satu kerajaan Budha yang berada di kepulauan nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya berjaya berdasarkan visi kemaritimannya yang menguasai jaringan transportasi dagang, jaringan komoditas dan jaringan pelabuhan terutama di sekitar Selat Malaka. Selain itu pemerintahan maritimnya kuat dan efektif serta tercatat sebagai pemerintahan dengan kekuatan laut yang diperhitungkan.

Kebesaran Kerajaan Sriwijaya itu dibuktikan dengan berbagai penemuan prasasti diantaranya adalah Kedukan Bukit (605 C/683 M) di Palembang, Prasasti Talang Tuwo (606 C/684 M) di sebelah barat Palembang, Prasasti Kota Kapur (608 C / 686 M) di bagian barat Pulau Bangka, Prasasti-prasasti Siddhayatra di daerah Palembang, Prasasti Telaga Batu (605 C / 683 M) di Palembang. Selain itu ada Prasasti Karang Birahi di Jambi, Prasasti Ligor (679 C

/ 775 M) di Tanah Genting Kra, yang melengkapi penemuan bukti-bukti peninggalan sejarah bangsa pada masa lampau. Penemuan berbagai bukti sejarah keberadaan Sejarah Sriwijaya ini sangat penting untuk mengetahui perjalanan panjang dan mata rantai sejarah Nusantara khususnya mengenai kemaritiman.

Di pulau Jawa terdapat kerajaan Hindu Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pun berdasarkan visi maritimnya. Wilayah kekuasaannya merupakan sebaran kerajaan bawahan yang memiliki pelabuhan dan komoditas dagang vital terutama beras. Kapal-kapal dan pelaut-pelaut Jawa tercatat dalam kronik-kronik di mancanegara (Sukodaya-Thailand dan Pegu-Myanmar) sebagai manifestasi kejayaan negara maritim Majapahit yang juga menjadi pusat budaya dan peradaban di Nusantara. Selain itu kekuatan maritimnya merupakan modal dasar untuk melakukan kolonisasi, ekspansi dan penetrasi budaya di zaman tersebut.

Hal ini terlihat ketika seorang putera bangsa yang bernama Mahapatih Gajah Mada ingin menyatukan kerajaan-kerajaan kecil Nusantara di bawah koordinasi Kerajaan Majapahit. Tidak dapat dikatakan apakah Mahapatih Gajah Mada berwawasan maritim atau tidak, tetapi apa yang telah dilakukan oleh orang besar tersebut merupakan sikap yang benar dalam konteks kebijakan Kerajaan Majapahit dalam wilayah perairan Nusantara yang negeri pasalnya berjumlah berpuluh-puluh baik di pulau Sumatera maupun di pulau Kalimantan. Wawasan ini tentu saja memiliki implikasi yang

menyangkut strategi dan kebijakan kerajaan tersebut dalam pengelolaan serta pemanfaatan laut utamanya dalam masalah transportasi serta pertahanan wilayah Majapahit sebagai pusat kerajaan yang harus mampu meng-kordinasi negeri kekuasaannya serta melindungi diri dari serangan musuh. Sistem transportasi perhubungan laut Majapahit konon diambil alih oleh Pemerintahan Hindia Belanda ketika berkuasa di wilayah Nusantara. Melihat kepada kondisi ‘maritim’ Majapahit serta potensi laut yang luar biasa selain sebagai sarana perhubungan, maka orientasi masyarakat Nusantara secara total dialihkan menjadi masyarakat darat dan dipekerjakan sebagai tenaga paksa dan kerja rodi. Dengan demikian, semangat kebaharian masyarakat Nusantara terpadamkan oleh situasi dan kondisi sosioekonomi serta budaya yang dengan sengaja ditransformasi oleh Belanda demi kepentingan ekonomi Belanda. Dengan langkah-langkah yang di lakukan terhadap penduduk asli Nusantara, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan visi kemaritimannya, yaitu dengan menguasai wilayah perairan Nusantara dari kawasan Utara: Ternate dan Tidore, kawasan Tengah: Makasar, kawasan Selatan Batavia dan sepanjang Pantura (pantai Utara Pulau Jawa).

Sementara itu, kerajaan dan kesultanan Islam pesisir utara Jawa, Demak, Bintara, Tuban, Lasem dan Jepara melanjutkan tradisi maritim Majapahit sekaligus menyebarkan *(prolifikasi)* agama Islam dan menantang keberadaan kekuatan maritim Portugis yang mulai

merajalela di Nusantara karena dorongan dinamika lingkungan ekonomi strategis (direbutnya Konstantinopel oleh Turki Osmani yang mengakibatkan terganggunya perdagangan komoditas rempah-rempah dan barang mewah dari Asia). Pada masa yang sama, kerajaan Bantenpun berkembang menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan wilayah barat Nusantara dan mengendalikan perdagangan lada.

Peran kekuatan maritim Demak digantikan oleh Mataram yang sampai abad ke - XVII masih dapat diperhitungkan sebagai negara maritim. Perubahan visi pemerintahan dan kekalahan dalam persaingan melawan VOC (kompeni dagang Hindia Timur) membuat Mataram kemudian menjadi lemah dan bervisi darat.

Abad ke-XVII ditandai juga dengan berjayanya kerajaan maritim Aceh yang melanjutkan tradisi Sriwijaya menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan alur laut perdagangan di sekitar Selat Malaka sampai awal abad ke-XVIII sebelum kemudian tidak lagi sanggup bersaing dengan kekuatan maritim imperialis barat Belanda dan Inggris. Di kepulauan Nusantara bagian Timur, Kesultanan Makasar dan konfederasi kerajaan etnis Bugis (Bone, Sawito, Luwu, Tanete dan lain-lain) yang berwawasan Maritim menjadi dua kekuatan yang mengendalikan wilayah perdagangan dan wilayah komoditas. Sifat diaspora (penyebaran) kedua kelompok etnis ini membuat mereka hadir dimana-mana dan dapat mempertahankan budaya Maritimnya hingga sekarang, meskipun kedua kerajaan tersebut pun tidak

sanggup menghadapi kekuatan maritim imperialis Barat (VOC maupun Belanda).

Untuk wilayah bagian timur terdapat Kesultanan Ternate dan Tidore, yang menguasai sumber komoditas sangat penting seperti rempah-rempah, dan mengendalikan pula perdagangan dan jaringan transportasi serta komunikasi Wilayah Timur Nusantara. Tradisi insularitas kedua kesultanan ini sangat terlihat dan merupakan satu ciri pemahaman geostrategi *'perfect isolation'* di Kepulauan Nusantara.

Kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim pernah mengalami keterpurukan. Hal ini terjadi setelah masuknya VOC ke Indonesia (1602 M-1798 M). Salah satu peristiwa bersejarah hilangnya kejayaan tersebut adalah dengan keluarnya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang dilakukan oleh Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta. Kedua raja keturunan Mataram tersebut menyerahkan perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda. Keputusan kedua raja yang telah dikendalikan oleh Belanda tersebut memasung kemampuan maritim bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi proses penurunan semangat dan jiwa maritim bangsa serta perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Indonesia yang semula bercirikan maritim menjadi sifat kedaratan.

Selain itu juga yang menyebabkan keterpurukan negara maritim Nusantara pada umumnya disebabkan karena

ketidakmampuannya melawan kekuatan maritim yang lebih yang dan menggunakan teknologi yang lebih canggih, dan terjadi pula kemerosotan kualitas sumberdaya manusia akibat berubahnya paradigma dari bangsa maritim menjadi bangsa agraris yang berorientasi daratan *(land minded)*. Sementara itu bangsa lain yang menganut wawasan maritim memperkaya diri dan memperkuat diri dengan landasan fikir kolonialisme, imperialisme dan *exploitation de l'homme par l'homme* (dominasi, eksploitasi dan pengendalian). Sumber keterpurukan lain adalah lemahnya kepemimpinan dan kenegarawanan para pemimpin Nusantara sehingga mudah terseret dalam krisis politik kratonik dan konflik internal yang tidak habis-habisnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dinamika lingkungan internasional pada waktu itu yang langsung tidak langsung mempengaruhi situasi konfliktual di kepulauan Nusantara, seperti kejayaan Turki Osmani, perang maritim antara Belanda-Inggris-Perancis, munculnya Napoleon dan sebagainya. Keterpurukan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Bangsa Indonesia tampaknya mulai sadar dan memandang penting bahwa kejayaan kemaritiman perlu diraih dan ditumbuhkan kembali. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan semenjak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikemukakan pada uraian di bawah ini:

- **UUD 1945**

Semenjak diproklamirkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dari negara kita dan terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia dalam pasal yang terdapat dalam undang-undang ini belum diatur secara jelas seperti terlihat pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat".* Memasuki era reformasi negara Indonesia baru ada kejelasan dalam Undang-undang dengan mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen yang terkait dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia, seperti dapat dilihat pada Amandemen IV UUD 1945 pada Bab IX A mengenai wilayah negara yang terdapat pada pasal 25 A menyatakan "*bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".* Dengan mengacuh pada Undang-undang ini maka sebagai negara kepulauan sudah menjadi kewajiban kita untuk membangun sektor maritim bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

- **Deklarasi Djoeanda**

Bangsa Indonesia yang berpotensi menjadi negara dan kekuatan maritim terbesar, di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, telah mengeluarkan suatu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Pada dasarnya konsep Deklarasi itu memandang bahwa kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis. Dengan adanya konsep ini, maka wilayah perairan nusantara yang tadinya merupakan wilayah laut lepas kini menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Deklarasi Djoeanda ini secara yuridis dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan telah memungkinkan Indonesia menyempurnakan luas wilayahnya melalui UU No. 5 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) termasuk di dalamnya integrasi Timor Timur; UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 61 tahun 1998 tentang penutupan Kantung Natuna dan Keluarnya Timor Timur.

- **Konvensi Hukum laut 1982**

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional telah dilaksanakan perjuangan yang terus menerus di forum internasional dan regional, sehingga

pada tahun 1982 di Teluk Montego, Jamaika, terdapat 119 negara yang menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau disebut juga *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), yang di dalamnya memuat sembilan buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang Prinsip "*Negara Kepulauan"*. Salah satu pasal dalam Prinsip Negara Kepulauan dengan memandang bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan justru sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip tentang fungsi laut sebagai alat pemersatu atau fungsi laut sebagai faktor integritas wilayah inilah yang kemudian hari menjadi wawasan kebangsaan negara Indonesia yaitu yang dikenal dengan wawasan nusantara.

Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang HUKUM LAUT 1982. Ratifikasi ini merupakan tindaklanjut dari gagasan negara kepulauan yang pada 28 tahun lalu dicetuskannya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sejak itu Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan Konvensi HUKUM LAUT PBB tahun 1982, dengan konvensi ini selanjutnya harus dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen hukum nasional agar dapat menjamin penerapannya secara keseluruhan.

- **Deklarasi Bunaken**

Sejak Deklarasi Bunaken ditandatangani oleh Presiden RI pada puncak kegiatan Tahun Bahari Internasional 1998 (TBI ’98) telah menegaskan bahwa mulai 26 September 1998 visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia diarahkan berorientasi ke laut. Kegiatan TBI ‘98 merupakan program UNESCO - PBB bahwa tahun 1998 sebagai Tahun Bahari Internasional sekaligus pencanangan upaya PBB dan bangsa Indonesia untuk menyadarkan umat manusia akan arti penting dari laut dan lingkungan kelautan sebagai warisan bersama umat manusia. Deklarasi Bunaken pada dasarnya secara tegas menyatakan 2 hal pokok yaitu kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya dan kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun kelautan. Kesadaran geografik adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami dan menyadari akan kondisi objektif wadah kepulauan Indonesia yang dua pertiga bagian wilayahnya mengembalikan kondisi ekonomi Nasional, yang sedang menyelesaikan berbagai krisis ini.

- **Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999**

Pada masa pemerintahan orde baru, sebagai landasan dalam pembangunan Indonesia berpedoman kepada amanat GBHN. Pada masa GBHN tahun 1973 sampai tahun 1998 pembangunan di bidang kelautan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga pembangunan kelautan masih jauh tertinggal dengan

pembangunan di sektor lain. Namun seiring dengan reformasi pembangunan terbukti sektor kelautan telah mulai diperhatikan pemerintah, hal ini dengan adanya kebijakan pembangunan di bidang kelautan sebagaimana diamanatkan dalam GBHN tahun 1999 yang diarahkan pada upaya sebagai berikut:

1). Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sesuai kemampuan lestari sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan;

2). Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, kelautan dan perikanan, khususnya nelayan dan petani ikan kecil;

3). Pengelolaan lingkungan kawasan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan;

4). Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa (perekat antar nusa) dan budaya bahari.

Kemudian strategi pembangunan maritim yang akan ditempuh adalah meliputi:

1). Memanfaatkan sumberdaya maritim secara optimal, efesien, dan berkelanjutan;

2). Memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat pesisir;

3). Menerapkan penggunaan IPTEK yang ramah lingkungan dan manajemen professional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan;

4). Mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi;

5). Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi maritim;

6). Membangun dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif;

7). Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya maritim;

8). Merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut;

9). Mengembangkan sistem dan mekanisme hukum serta kelembagaan nasional dan internasional;

10). Menanamkan wawasan kelautan kepada seluruh masyarakat;

11). Pengelolaan kawasan-kawasan maritim yang berpotensi konflik terutama di wilayah perbatasan antar negara.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam GBHN 1999, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memperhatikan pembangunan di bidang kelautan dan telah menetapkan strategi dalam mengelola sumberdaya maritim.

- **Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Lembaga Dewan Maritim Indonesia**

Seiring dengan reformasi pembangunan, timbul tuntutan untuk mencari kebijakan pembangunan yang baru dan kebutuhan untuk membangun bidang kelautan sangat besar. Implikasinya maka tahun 1999 pada Kabinet Reformasi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pemerintah pembangunan di

bidang maritim makin menampakan harapan cerah dengan telah dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) yang sekarang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dalam menjalankan tugasnya memiliki keterbatasan tugas dan fungsinya dalam mengelola sektor kelautan, untuk itu dalam rangka mengkoordinasikan permasalahan kelautan yang selama ini dalam pengelolaannya masih bersifat sektoral dibentuk lembaga Dewan Maritim Indonesia (DMI) berdasarkan Keppres No. 161 tahun 1999. DMI bertugas membantu Presiden RI dalam menetapkan kebijakan umum di bidang kelautan. Dalam melaksanakan tugasnya DMI menyelenggarakan fungsi :

(a) merumuskan kebijakan kewilayahan nasional, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan

(b) memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal-hal tersebut di atas, dan hal-hal lain atas permintaan Presiden

(c) melakukan konsultasi dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan di bidang kelautan

(d) mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi kebijakan di bidang kelautan.

Kedua lembaga tersebut diharapkan menjadi suatu lembaga yang mampu menjadi wadah untuk mengelola sektor kelautan yang mempunyai potensi yang sangat besar, sehingga ke depan dapat

meningkatkan devisa negara yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

- **Seruan Sunda Kelapa**

Pada tanggal 27 Desembar 2001, dalam rangka upacara Peringatan Hari Nusantara Tahun 2001, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, telah dicanangkan "*Seruan Sunda Kelapa"* oleh Presiden RI Megawati Sukanoputri yang pada intinya seruan tersebut mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersamasama membangun kekuatan maritim/kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam. Isi Seruan Sunda Kelapa meliputi 5 pilar program dalam pembangunan untuk menuju negara maritim sejati. Dengan seruan ini, kesadaran bangsa melalui pemerintah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, melalui 5 pilar program dalam pembangunan untuk menuju negara maritim sejati.

- **Gerbang Mina Bahari**

Selain perlu dibangunnya pilar-pilar pendukung untuk menjadi negara maritim, yang berisi tentang : *Wawasan Maritim, Kedaulatan Nyata di laut, Industri Maritim, Tata Ruang Maritim* dan *Sistem*

Hukum Maritim. Sebagaimana diamanatkan dalam Seruan Sunda Kelapa Presiden RI pada tahun 2003 juga mencanangkan program *"Gerbang Mina Bahari"* di Provinsi Gorontalo yang secara serentak dan terpadu direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan diseluruh Indonesia, diharapkan seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang selama ini telah dilaksanakan secara sektoral dapat dilaksanakan dengan terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga pembangunan kelautan dan perikanan akan berjalan efektif. Gerbang Mina Bahari dilaksanakan bersifat lebih khusus di bidang Industri Perikanan, Pelayaran dan Wisata Bahari dibandingkan dengan Seruan Sunda Kelapa yang bersifat lebih umum. Adapun *Misi Gerbang Mina Bahari adalah melakukan percepatan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan.*

Tujuan pelaksanaan Gerbang Mina Bahari, antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
2. Meningkatkan penerimaan devisa Negara dan kontribusi terhadap PDB.
3. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
4. Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di dalam negeri.

5. Memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.

Dengan adanya Gerbang Mina Bahari diharapkan terjadi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara sistematis dan terukur, yang dilakukan oleh seluruh unsur, baik yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perhubungan, maupun lintas sektoral yang didukung oleh seluruh elemen bangsa guna meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

II. 1. 3. Tinjauan Umum Nusantara

- Definisi Nusantara

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia-Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia.

Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Akibat perkembangan politik selanjutnya, istilah ini kemudian dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan bagi Kepulauan Melayu (*Malay Archipelago*), suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

- Definisi Wawasan Nusantara

Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penglihatan atau tanggap indrawi, Wawasan juga mempunyai pengertian menggabarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tanggap incrawi.

Nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk kata yasng berasal dari istilah *nation* berarti bangsa yang telah mengidentiikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara.

Nusantara, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di

atara Samodra Pasifik dan Samodra Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua Australia.

Wawasan Nasional merupakan “cara pandang” suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya . Wawasan merupakan penjabaran dari falsafat bangsa Indonesia sesaui dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya.

Esensinya; bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Bagaimana bangsa tersebut memandang diri dan lingkungannya.

Dengan demikian Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berfikir, cara bertindak, cara bertingkah laku, bangsa Indonesia sebagai interaksi prosees psikologis, sosiokultural, dengan aspek ASTAGATRA (Kondisi geografis, kekayaan alam dan kemampuan penduduk serta IPOLEKSOSBUD Hankam).

II. 2. Studi Antropometri

II. 2. 1. Analisa Manusia

A. Karakteristik Pengunjung

Frase dalam desertasinya : Anthropology & the Public (The role of the Museums, Leiden, 1960), membagi pengunjung museum menjadi jenis pengunjung lama dan pengunjung baru. Apabila ini diterapkan kepada pengunjung Museum Maritim Nusantara, adalah sebagai berikut :

- Jenis pengunjung lama

Terdiri dari para kolektor, mahasiswa, ilmuwan/peneliti kemaritiman atau bidang studi terkait, dan rombongan pelajar SD/SMP/SMU yang karena latar belakang pendidikannya, mempunyai hubungan tertentu dengan koleksi Museum Maritim. Kunjungan mereka ke Museum Maritim sudah direncanakan terlebih dahulu dengan motivasi yang jelas. Kecuali kelompok pelajar SD-SMU, tanpa bantuan dari siapapun mereka dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan koleksi Museum tersebut. Apabila mereka menghubungi staf museum, maka hal itu dilakukannya berkaitan dengan kepentingan mereka lebih sekedar mengapresiasikan pameran (meneliti misalnya).

- Jenis pengunjung baru

Karakteristik pengunjung jenis ini sulit dilukiskan. Mereka biasanya datang ke Museum tanpa tujuan tertentu. Bila suatu ketika mereka berkunjung disebabkan kejenuhan atau keinginan spontan,

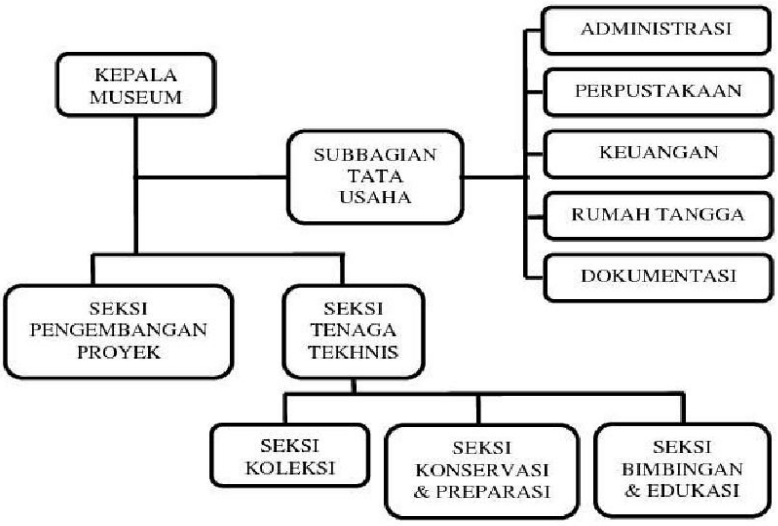
setelah itu mereka kembali pasif dan tidak punya motivasi yang kuat untuk kembali datang ke museum.

B. Struktur Organisasi Museum Menurut Buku Pedoman Pendirian Museum (1999)

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan museum adalah faktor organisasi. Setiap museum sebaiknya mempunyai struktur organisasi yang mencerminkan tugas dan fungsi museum. Sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi (*kurator*), bagian konservasi (perawatan), bagian penyajian (*preparasi*), bagian pelayanan masyarakat dan bimbingan *edukasi*, serta pengelola perpustakaan.

Adapun struktur organisasi yang umum dimiliki oleh sebuah museum, antara lain:

Bagan.1 Struktur Organisasi Museum



Sumber : Buku Pedoman Pendirian Museum, 1999.

1. Kepala/Direktur Museum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi museum.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Museum memimpin penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga dan ketertiban museum.
3. Kepala Bagian Kuratorial memimpin penyelenggaraan pengumpulan, penelitian dan pembinaan koleksi.
4. Kepala Bagian Konservasi dan Preparasi memimpin penyelenggaraan *konservasi, restorasi* dan *reproduksi* koleksi serta *preparasi* tata pameran.

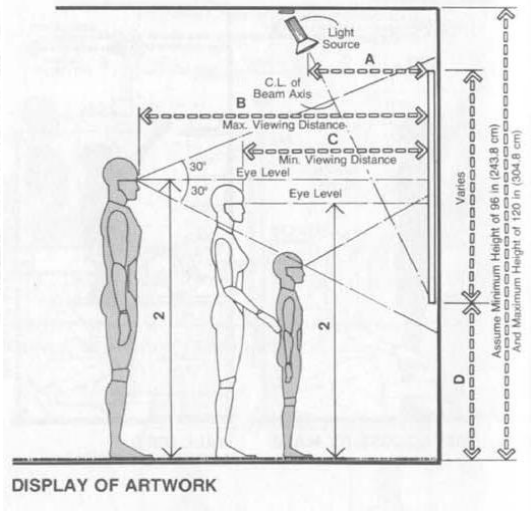
5. Kepala Bagian Bimbingan dan Publikasi memimpin penyelenggaraan kegiatan bimbingan dengan metode dan sistem *edukatif kultural* dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan serta menyelenggarakan *publikasi* tentang koleksi museum.
6. Kepala Bagian Registrasi dan Dokumentasi memimpin penyelenggaraan registrasi dan dokumentasi seluruh koleksi. Perpustakaan menyelenggarakan perpustakaan, dan menyimpan hasil penelitian dan penerbitan museum.

C. Analisa Ergonomi dan Antropometri

- Ruang Pamer

Gambar.2 Ergonomi dan Antropometri Ruang Pamer

	in	cm
A	16–24	40.6–61.0
B	60–78	152.4–198.1
C	30–42	76.2–106.7
D	36	91.4
E	20–24	50.8–61.0
F	51	129.5
G	33	83.8
H	18	45.7
I	40–44	101.6–111.8
J	80–88	203.2–223.5

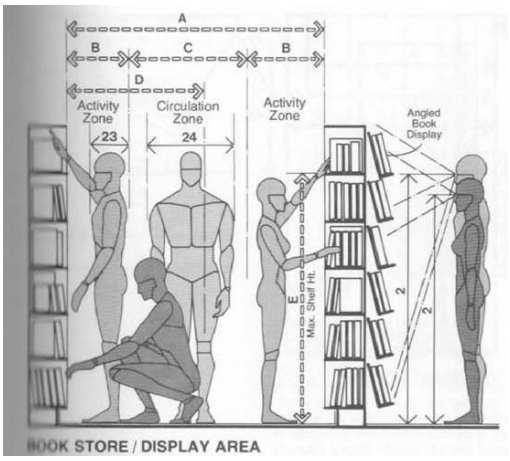


(Sumber : Buku "*Human Dimension & Interior Space"* oleh Julius Panero & Martin Zelnik)

- Perpustakaan

Gambar.3 Ergonomi dan Antropometri Display

	in	cm
A	66 min.	167.6 min.
B	18 min.	45.7 min.
C	30 min.	76.2 min.
D	36	91.4
E	68	172.7
F	48	121.9
G	36 min.	91.4 min.
H	66	167.6
I	72	182.9
J	60–66	152.4–167.6

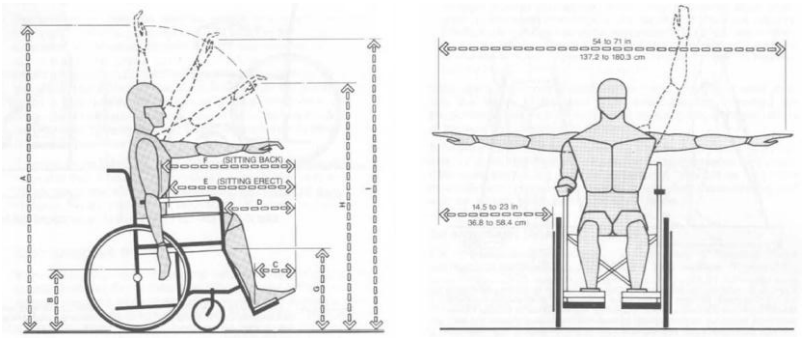


(Sumber : Buku "*Human Dimension & Interior Space"* oleh Julius Panero & Martin Zelnik)

- Dimensi Manusia Penyandang Cacat
  - Cacat Tubuh dengan Alat Bantu Kursi Roda

    Kelompok cacat tubuh ini tergolong ke dalam kategori orang dengan ketidakmampuan menggerakan kaki baik temporer maupun permanen. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah shalat, umumnya mereka dapat melaksanakannya dalam posisi duduk hingga berbaring, tergantung kelumpuhan atau kecacatan bagian tubuh yang di alaminya.

Gambar.4 Ergonomi dan Antropometri Manusia Penyandang Cacat dengan Alat Bantu Kursi Roda



(Sumber : Buku "*Human Dimension & Interior Space"* oleh Julius Panero & Martin Zelnik)

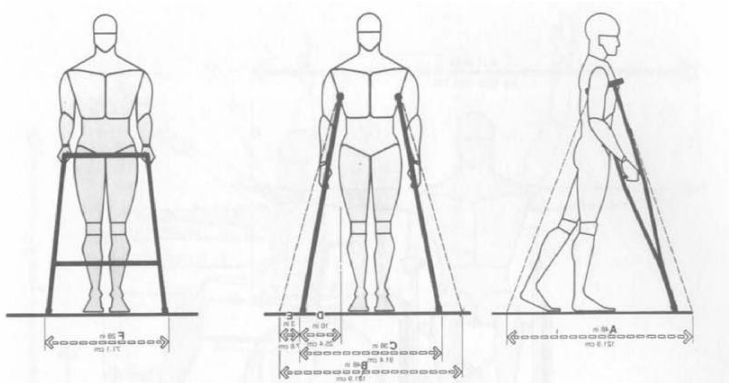
  - Cacat Tubuh dengan Alat Bantu Penopang

    Pada dasarnya, kelompok cacat tubuh ini tergolong ke dalam kategori orang dengan kondisi kaki yang lemah (radang

sendi, akibat kecelakaan, dll). Sehingga dalam pelaksanaan ibadah shalat, umumnya mereka dapat melaksanakannya dalam posisi duduk.

Berdasarkan kondisi ini pula, dapat diketahui bahwa keterbatasan kaki penopang maupun penyalahgunaan dan penempatan penopang secara nyata membatasi kemampuan mereka untuk mengungkit, terutama ketika mereka harus melakukan gerakan membuka atau menutup pintu dan berdiri atau bangkit dari duduk.

Gambar.5 Ergonomi dan Antropometri Manusia Penyandang Cacat dengan Alat Bantu Penopang



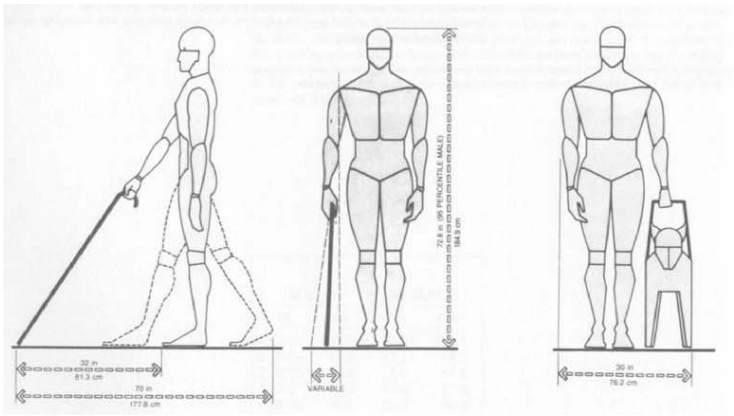
(Sumber : Buku "*Human Dimension & Interior Space"* oleh Julius Panero & Martin Zelnik)

- Cacat Tubuh dengan Alat Bantu Tongkat

Alat bantu tongkat umumnya digunakan bagi mereka yang buta, memiliki bagian tubuh yang terluka, atau yang berkurang kemampuan geraknya karena penuaan, radang sendi,

kelumpuhan otak, diabetes, *multiple sceloris*, dan berbagai penyakit lainnya. Bagi mereka yang buta, sehubungan dengan keterbatasannya, akan memerlukan jarak bersih yang maksimal. Kelompok cacat tubuh ini, umumnya dapat melaksanakan ibadah shalat dengan posisi duduk (lansia atau orang dengan kondisi kaki lemah) dan posisi berdiri/normal (orang buta).

Gambar.6 Ergonomi dan Antropometri Manusia Penyandang Cacat dengan Alat Bantu Tongkat



(Sumber : Buku "*Human Dimension & Interior Space"* oleh Julius Panero & Martin Zelnik)

II. 2. 2. Analisa Koleksi

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan rohnya sebuah museum, maka koleksi harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

A. Prinsip dan persyaratan sebuah benda menjadi koleksi, antara lain :
   - Memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk nilai *estetika*).
   - Dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal secara historis dan geografis, atau periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda alam).
   - Harus dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti kenyataan dan eksistensinya bagi penelitian ilmiah.

B. Pertimbangan skala *prioritas*, yaitu penilaian untuk benda-benda yang bersifat :
   - *Masterpiece*, merupakan benda yang terbaik mutunya.
   - Unik, merupakan benda-benda yang memiliki ciri khas tertentu bila dibandingkan dengan benda-benda yang sejenis.
   - Hampir punah, merupakan benda yang sulit ditemukan karena dalam jangka waktu yang sudah terlalu lama tidak dibuat lagi.
   - Langka, merupakan benda-benda yang sulit ditemukan karena tidak dibuat lagi atau karena jumlah hasil pembuatannya hanya sedikit.

C. Klasifikasi koleksi Museum Maritim berdasarkan disiplin ilmu :

- Koleksi *Biologika*: Benda koleksi yang merupakan objek disiplin ilmu biologika, antara lain tengkorak atau kerangka manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan baik yang diawetkan maupun yang tidak diawetkan.

  Jenis koleksi yang berkaitan : Biota laut

- Koleksi *Etnografika*: Benda koleksi yang merupakan objek penelitian *antropologi.* Benda–benda tersebut merupakan hasil budaya atau menggambarkan identitas suatu etnis.

  Jenis koleksi yang berkaitan : Realia perahu, replika dan miniatur perahu, teknologi penangkapan ikan

- Koleksi *Historika*: Benda koleksi yang menjadi objek penelitian sejarah. Benda-benda ini mempunyai nilai sejarah sejak masuknya budaya barat sampai sekarang.

  Jenis koleksi yang berkaitan : Alat navigasi

- Koleksi Seni Rupa/Seni Kria: Benda koleksi seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui objek-objek dua atau tiga dimensi.

  Jenis koleksi yang berkaitan : Maket, foto, lukisan.

D. Koleksi yang dipamerkan pada ruang pamer perlu memperhatikan tiga hal (Miles, 1998), yaitu sebagai berikut :

- Tingkat Kepentingan

Tingkat kepentingan berhubungan dengan nilai yang dikandung obyek yang dipamerkan serta cara memamerkan nilai tersebut.

- Fungsi

  Fungsi berhubungan dengan penyajian objek pamer, misalnya objek pamer yang membutuhkan adanya arus terus menerus tanpa terputus oleh arus pengunjung.

- Tata Urutan

  Tata urutan berhubungan dengan urutan penyajian dalam urutan aktivitas.

E. Menurut Neufert (1992), kebutuhan ruang pamer/*display* berdasarkan objek pamer, adalah sebagai berikut :
   - Ruang yang dibutuhkan untuk lukisan : 3-5 m^2 luas dinding
   - Ruang yang dibutuhkan untuk patung : 6-10 m^2 luas lantai
   - Ruang yang dibutuhkan 400 keping : 1 m^2 ruang lemari kabinet, yaitu sebuah lemari berukuran tebal 80 cm, tinggi 160 cm dengan panjang bebas sesuai dengan ukuran ruang.

F. Menurut Lawson (1981), standart yang dibuat untuk pameran mempunyai beberapa ukuran, yaitu sebagai berikut :
   - Stand kecil berukuran lebar 3 m dan kedalaman 2,5-3 m (luas 9 m^2)
   - Stand sedang berukuran 15 m^2

II. 2. 3. Analisa Sistem Lingkungan Interior

A. Sistem dan Standar Teknis Pencahayaan Museum

Kehadiran cahaya pada lingkungan ruang dalam bertujuan menyinari berbagai bentuk elemen-elemen yang ada di dalam ruang, sedemikian rupa sehingga ruang menjadi teramati, terasakan secara visual suasananya (Honggowidjaja, 2003).

Sistem pecahayaan yang mendukung sebuah ruang pamer berdasarkan sumber serta fungsinya dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- Pencahayaan Alami

  Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari. Sebagai salah satu sumber pencahayaan, sinar matahari memiliki berbagai kualitas pancahayaan langsung yang baik. Penggunaan sinar matahari sebagai sumber pencahayaan alami akan mengurangi biaya operasional. Pencahayaan langsung dari cahaya matahari didapat melalui bukaan pada ruang, berupa bukaan pada bidang, sudut diantara bidang-bidang. Bukaan-bukaan dapat diletakkan pada dinding maupun langit-langit.

- Pencahayaan Merata Buatan

  Pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang berasal dari tenaga listrik. Suatu ruangan cukup mendapat sinar alami pada siang hari. Kebutuhan pencahayaan merata buatan ini disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas akan intensitas cahaya serta luasan ruang. Pencahayaan merata buatan berupa lampu

pijar atau lampu halogen yang dipasang pada langit-langit, maupun lampu sorot dengan cahaya yang menghadap ke dinding untuk penerangan dinding yang merata.

- Pencahayaan Terfokus Buatan

  Pencahayaan terfokus buatan *(artificial lighting)* merupakan cahaya yang berasal dari tenaga listrik. Pencahayaan terfokus dimaksudkan untuk memberikan penerangan pada objek tertentu yang menjadi spesifikasi khusus atau pada tempat dengan dekorasi sebagai pusat perhatian dalam suatu ruang, berupa lampu sorot yang dipasang pada dinding, partisi, maupun langit-langit.

B. Rekomendasi tingkat pencahayaan untuk ruangan dalam museum :

- Ruang kantor : 500 *lux* dan 300 *lux*.
- Ruang serbaguna : area duduk 300 *lux*, panggung 600 *lux.*
- Ruang pameran : 500 *lux*, 300 *lux*, 100 *lux* tergantung keperluan.

C. Sistem pencahayaan pada museum pastinya memiliki tema tertentu dan dapat mempengaruhi seluruh unsur desain yang lain, seperti sirkulasi, tata ruang dan tampilan bangunan. Pentaan cahaya dalam ruang sangat erat kaitannya dengan fungsi dan kegiatan di dalam

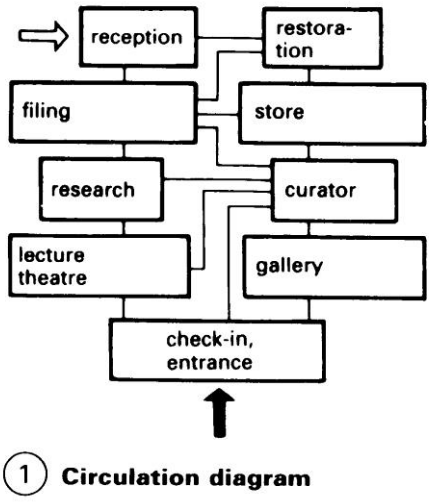
ruang tersebut. Pada ruang pamer ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencahayaan, misalnya :

- Skala ruang, bahan yang dipakai pada lantai, dinding dan plafon, ukuran bukaan ruang, warna dan tekstur.
- Skala, bentuk, tekstur, warna, bahan objek yang dipamerkan.
- Perilaku pengunjung.

D. Analisa Ergonomi dan Antropometri (Architec Data;Ernest Neufert. 3rd Edition, 2000)

- Diagram Sirkulasi

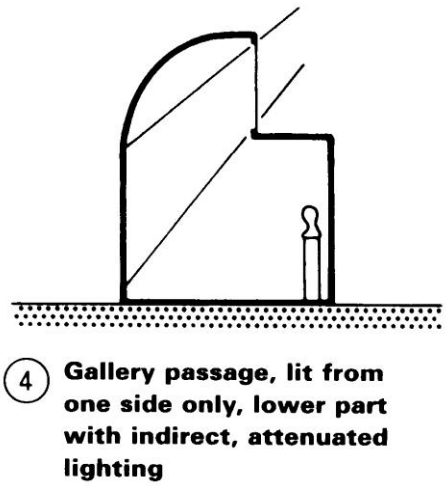
Bagan.2 Diagram Sirkulasi



(Sumber : Buku “Architect Data” oleh Ernest Neufert)

- Bagian Galeri

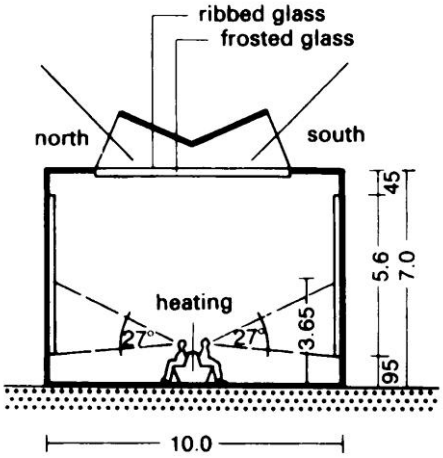
Gambar.7 Pencahayaan pada Gallery



(Sumber : Buku “Architect Data” oleh Ernest Neufert)

- Ruang Pamer

Gambar.8 Pencahayaan pada Ruang Pamer Berdasarkan Eksperimen Boston

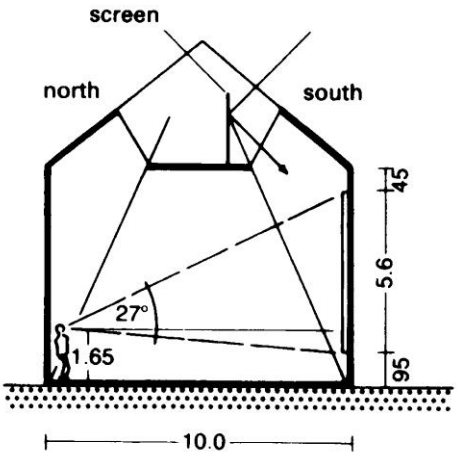


(5) Well-lit exhibition hall based on Boston experiments

(Sumber : Buku “Architect Data” oleh Ernest Neufert)

- Pencahayaan Beraturan yang Ideal dari Dua Sisi

Gambar.9 Pencahayaan Ideal dari Kedua Sisi

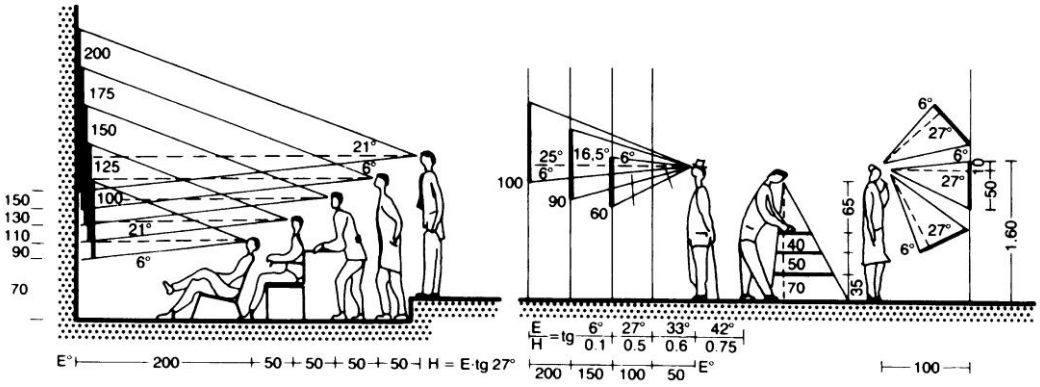


(6) Ideal uniform lighting from both sides (following S. Hurst Seager)

(Sumber : Buku “Architect Data” oleh Ernest Neufert)

- Bidang Penglihatan

Gambar.10 Area Jarak Pandang dan Jarak

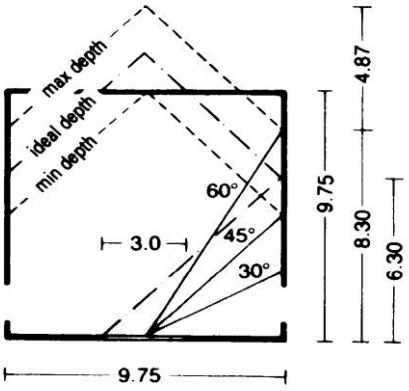


⑨ **Field of vision: height/size and distance**

(Sumber : Buku “Architect Data” oleh Ernest Neufert)

- Ruang Pamer dengan Pencahayaan Menyamping

Gambar.11 Ruang Pamer dengan Pencahayaan Samping



⑩ **Exhibition room with side lighting**

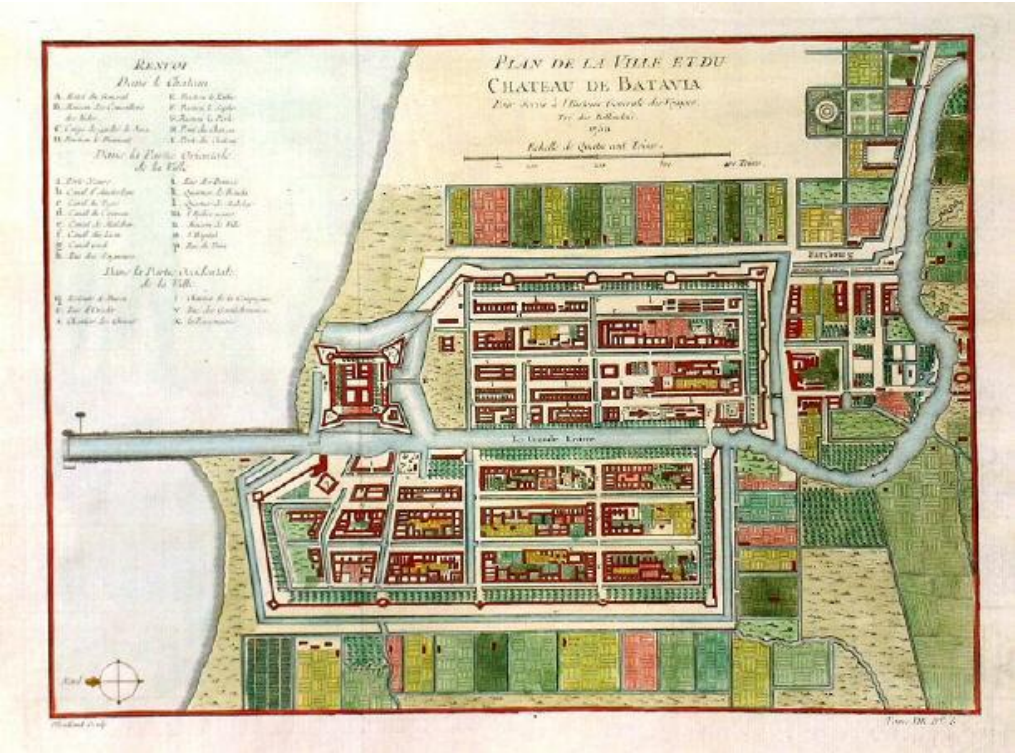
(Sumber : Buku “Architect Data” oleh Ernest Neufert)

II. 3. Studi Eksisting

Bangunan yang di gunakan untuk perancangan Museum Maritim Nusantara ini merupakan bekas gudang barat(*westzydsche pakhuizen*) milik VOC yang di dirikan pada tahun 1652. Bangunan ini terletak di jalan Pasar ikan No. 1 Jakarta Pusat. Kini bangunan tersebut tergolong Bangunan Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993.

Dalam pada itu, berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1999 tentang *Pelestarian dan pemanfaatan Lingkungan dan Cagar Budaya,* bangunan ini merupakan bangunan BCB golongan A. Hal ini berarti segala bentuk intervensi fisik harus mengikuti kaidah konservasi bangunan serta tidak melupakan prinsip-prinsip pemugaran.

II. 3. 1. Sejarah Kawasan



Gambar.12 Peta Kawasan Sunda Kelapa pada Masa VOC

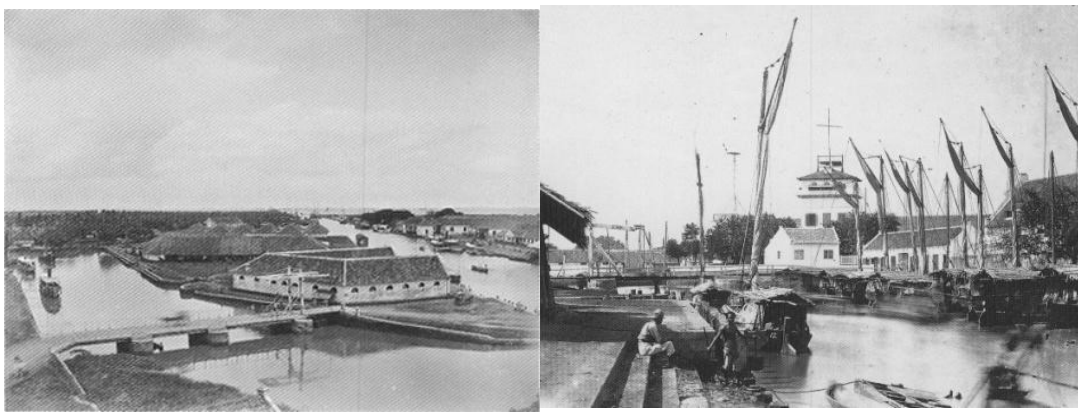
(Sumber : Ringkasan Eksekutif Museum Bahari Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta)

Kawasan sekitar bangunan ini sangat terkait erat dengan keberadaan pelabuhan kuno Sunda Kelapa dan perkembangan awal kota Batavia. Secara kronologis sejarah kawasan ini yaitu sebagai berikut :

- Pelabuhan Sunda Kelapa mulai dikenal oleh pedagang asing sebelum abad V masehi.
- Pelabuhan Sunda Kelapa berada di bawah kekuasaan Banten setelah berhasil direbut oleh pasukan Fatahillah pada tahun 1527 hingga akhirnya direbut Belanda tahun 1619.

- Sebelum tahun 1619 kawasan bangunan ini merupakan rawa dan berada diluar garis pantai kota Batavia.
- Perkampungan pedagang dan pelaut berada di luar kota Batavia mulai terbentuk sejak abad ke-17. Kini kampung tersebut dikenal dengan nama Luar Batang.
- Belanda kemudian membangun kanal (*vrijmanshaven*) di utara kawasan ini pada tahun 1646.
- Pada tahun 1652 VOC membangun bagian tertua bangunan gudang barat (*westzydsche pakhuizen*) yang kini menjadi Museum serta gudang lainnya di sisi timur (*oostzy-dsche pakhuizen*) sedikit lebih awal, yaitu 1633/48.
- Belanda membangun bagian gedung utama Galangan Kapal tahun 1722-1731 di bagian selatan kawasan ini.
- Belanda membangun menara syahbandar (*uitkijk te Batavia*) diatas bekas bastion *culemborg* tahun 1839.
- Peranan pelabuhan Sunda Kelapa semakin menurun akibat digantikan oleh pelabuhan baru, Tanjung Priuk pada tahun 1877.
- Bangunan-bangunan di area pulau Pasar Ikan dibangun pada awal abad XX, seperti pasar heksagon, pelelangan ikan, dan aquarium.

Gambar.13 Bangunan Bekas Gudang Rempah VOC Sekitar Tahun 40-an



(Sumber : Ringkasan Eksekutif Museum Bahari Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta)

II. 3. 2. Sejarah Bangunan

Beberapa fakta sejarah dan bukti arkeologis dari bangunan ini, yaitu (Heuken 2000, Heuken dan Pamungkas 2001):

- Bagian tertua dari bangunan ini (*westzydsche pakhuizen)* dibangun tahun 1652
- Bukti dari beberapa kali perluasan (termasuk penambahan gedung B dan C kemudian) dapat ditelusuri pada peta-peta kuno batavia abad XVII-XVIII serta inskripsi angka tahun pada pintu masuk utama (1718, 1719, 1773 dan 1774 AD).
- Bangunan didirikan di atas permukaan rawa yang sebelum tahun 1619. Peta-peta kuno Batavia dari awal abad XVII menunjukkan lokasi museum berada di luar garis pantai kota Batavia.
- Bangunan gudang tersebut dibangun dengan pondasi dangkal, menggunakan teknik *roosterfundering*.
- Dari segi teknologi konstruksinya, bangunan ini merupakan bangunan dengan konstruksi "*wet masonry technique*", yaitu jenis bangunan yang menggunakan spesi di antara nat-nat komponen bangunannya.
- Meskipun sebuah gudang, namun aspek fortifikasi (pertahanan) tetap diaplikasikan melalui penggunaan tembok yang sangat tebal dan keberadaan sisa tembok kota Batavia di sisi timur dan utaranya.
- Bangunan ini mewakili ciri khas bangunan di awal periode kolonial Belanda (abad XVII-XVIII), yaitu gedung dengan banyak jendela, pintu besar (melengkung), tembok sangat tebal, sedikit sekali bukaan

(void), tanpa serambi (verandah), tanpa tritisan, serta jendela *dormer* dan *gable* pada atapnya.

- Fungsi bangunan sebagai gudang di masa lalu terlihat jelas melalui bentuk ruangan yang besar dan memanjang, banyak jendela untuk menjaga rempah-rempah tetap kering, serta kait tempat timbangan di setiap lobby utama.
- Terdapat bukaan (void) di setiap lobi gedung yang menghubungkan seluruh lantai secara vertikal. Kemungkinan bukaan berfungsi sebagai akses untuk keluar masuk barang/komoditi perdagangan.

Gambar.14 Bangunan Bekas Gudang Rempah VOC Sekitar Tahun 40-an



(Sumber : Ringkasan Eksekutif Museum Bahari Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta)

II. 3. 3. Pengendalian Drainase Bangunan

Permasalahan utama drainase adalah rembesan air laut *(seepage)* melalui tanah dan limpasan air laut *(rob)* di permukaan tanah. Berdasarkan pengukuran hidrotopografi, levasi lahan area dalam bangunan termasuk lantai dasar gedung A, B dan C terletak dibawah elevasi air laut rata-rata atau antara 0 – 1.00 m sepanjang waktu. Sistem drainase yang ada pada area bangunan saat ini terdiri dari saluran tertutup dan terbuka dengan sistem pengaliran secara gravitasi dan pemompaan ke arah Kali Ciliwung.

II. 3. 4. Konservasi Bangunan

Prinsip penanganan konservasi pada bangunan ini mengacu pada prinsip otentitas berupa :

- Keaslian bahan *(authenticitiy of material)*
- Keaslian desain *(authenticity of design)*
- Keaslian teknologi penegerjaan *(authenticity of workmanship)*
- Keaslian tata letak *(authenticity of setting)*

II. 4. Studi Banding

II. 4. 1. Museum Bahari Jakarta

Nama Museum : Museum Bahari

Lokasi : Jl. Pasar Ikan No. 1 Jakarta

Jenis fasilitas : Edukasi

Data Koleksi Museum Maritim

Jumlah Koleksi : 968 buah

Tipe Bentuk : 2 dimensi dan 3 dimensi

Jenis : Realia (bentuk asli), replika (tiruan), Maket, foto serta lukisan

Ukuran Terbesar : 14m x 8m, Cadik Irian (Realia)

Ukuran Terkecil : 30cm x 15cm, Kapal Jerman (Replika)

- Pencitraan



Gambar.15 Museum Bahari Jakarta

(Sumber : Dokumen Pribadi)

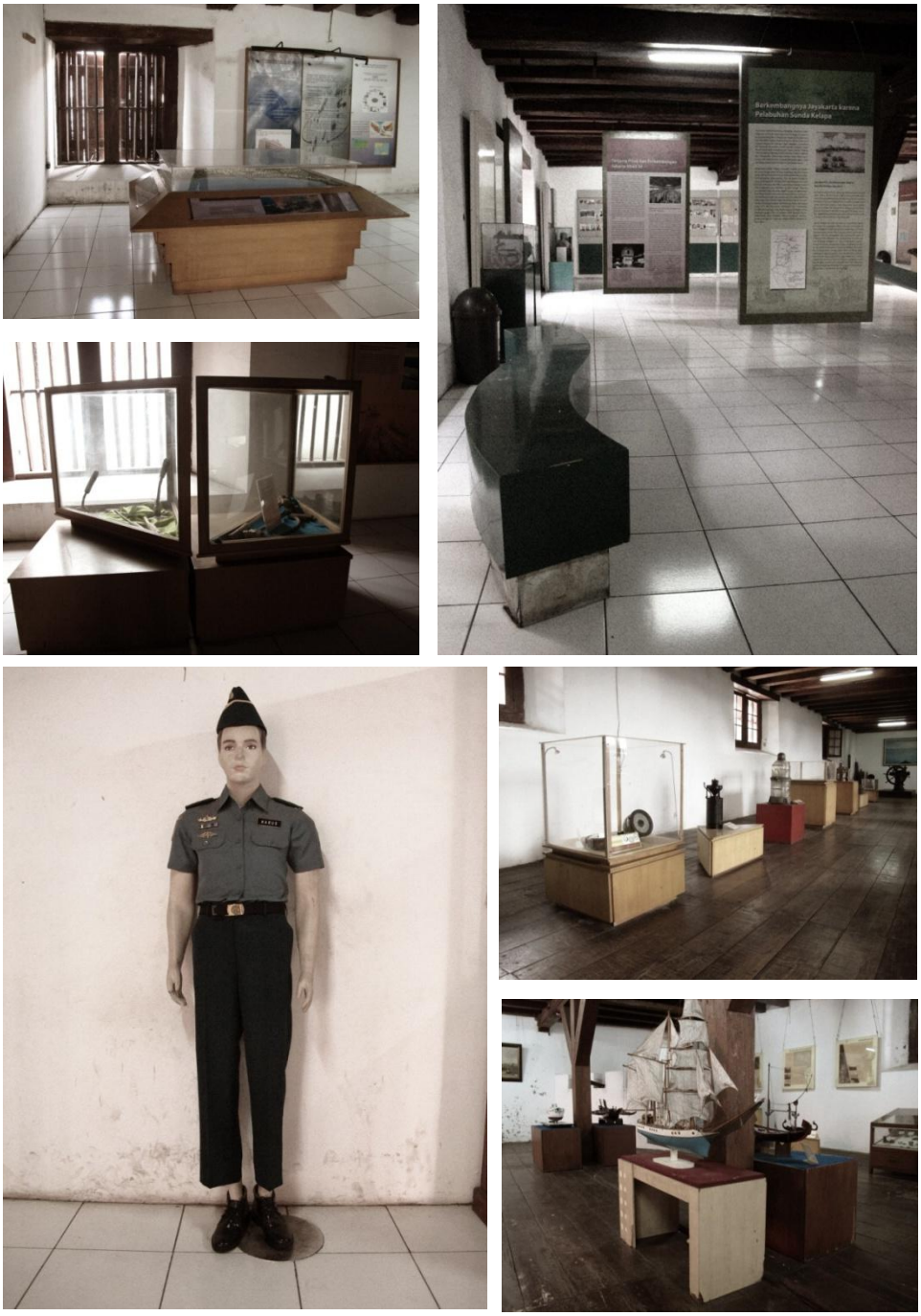
- Pencahayaan dan Penghawaan



Gambar.16 Museum Bahari Jakarta

(Sumber : Dokumen Pribadi)

- Sistem Pamer



Gambar.17 Museum Bahari Jakarta

(Sumber : Dokumen Pribadi)